

**MANAJEMEN KURIKULUM INKLUSI: STUDI IMPLEMENTASI
MANAJEMEN KURIKULUM INKLUSI DI SMP MUHAMMADIYAH 9
YOGYAKARTA**

Oleh:

Fahmi Firmansyah

NPM : 20120720105, Email : syahfirman1212@gmail.com

Dosen Pembimbing:

Drs. Syamsudin, M. Pd.

NIK : 19630710199303133018, Email : syamhs@gmail.com

Alamat: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Telepon (0274) 387656, Faksimile (0274) 387646, Website <http://www.umy.ac.id>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi manajemen kurikulum inklusi di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Yogyakarta (SMPM 9) dan (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen kurikulum inklusi tersebut.

Penelitian ini termasuk pada penelitian dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode fenomenologi. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru mata pelajaran dan siswa ABK. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *interactive* model Miles dan Huberman.

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Implementasi Manajemen Kurikulum Inklus terdiri dari (a) secara proses perencanaan, kurikulum inklusi yang ada di SMPM 9 ini berupa kurikulum nasional yang bersifat umum dan modifikasi kurikulum yang bersifat khusus (b) secara organisasi kurikulum, di sekolah tersebut melibatkan beberapa hal berikut, ruang lingkup, kontinuitas, keseimbangan bahan pelajaran dan alokasi waktu (c) implementasi kurikulum, klasifikasi kemampuan

yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap kemampuan peserta didik ABK serta strategi *Positive Behavioral Support* dan pendampingan psikolog bagi peserta didik ABK (d) evaluasi kurikulum telah berjalan secara terstruktur dan menyeluruh. (2) Faktor pendukung dan penghambat adalah (a) faktor pendukung yang ditemukan ialah dukungan penuh kepala sekolah, pemahaman yang cukup mapan di antara guru dan peserta didik tentang peserta didik ABK, kebijakan pendampingan yang dilakukan pula oleh psikolog serta tercukupinya perangkat tindakan inklusi (b) faktor penghambat yang ditemukan ialah proses pembuatan perencanaan dan program pembelajaran individu hanya dilakukan oleh guru GPK. Faktor selanjutnya ialah tidak dapat ditebaknya kondisi para peserta didik ABK, sehingga pada suatu waktu, semua peserta didik ABK membutuhkan tindakan yang sama, sehingga penanganan menjadi kewalahan.

Kata kunci: Manajemen, Kurikulum, Inklusi

ABSTRACT

This study aims to (1) find out the implementation of inclusive curriculum management at SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta and (2) to figure out the supporting and inhibiting factors in implementing the inclusive curriculum management

This study was a descriptive-qualitative research that used phenomenological method. The subjects of the study were the Head Master, the special assistant teachers, the teachers and the ABK (*Anak Berkebutuhan Khusus*/handicapped) students. The data gathering technique was conducted through observation, interview and documentation. The data analysis technique was using Miles and Huberman's interactive model.

Result shows that (1) the implementation of inclusive curriculum management covers (a) planning process, inclusive curriculum that involves general and modified National curriculum, (b) curriculum organization, in which the school involves several things, such as the scope, continuity, materials balance and time allocation, (c) curriculum implementation, where there is skill classification done by the institution towards the ABK students as well as positive behavioral support strategies and psychological support for the ABK students, (d) curriculum evaluation that has been running in an organized and comprehensive way. (2) The supporting and inhibiting factors include (a) the supporting ones where there is full support from the Head Master, sufficient comprehension between the teachers, the students, and other inclusive staff, psychological support by psychologist, as well as sufficient inclusive action components, (b) while the inhibiting one is that the planning and individual

learning process have been done only by the GPK teachers. Another factor is that there is unpredictable condition of ABK students. There is a situation where all ABK students need equal treatments that it makes overwhelming management

Key Words: Management, Curriculum, Inclusion

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi pada peradaban umat manusia sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan manusia untuk dapat menerima perbedaan yang terjadi diantara umat manusia itu sendiri (UNESCO. *Guidelines for Inclusion : Ensuring access to Education for All* Tahun 2005). Perbedaan yang disebabkan oleh ras, fisik, etnik, kemampuan, tingkat hidup, cara pandang, bahkan agama menimbulkan rasa superior, kompetisi dan inferior diantara manusia yang akhirnya menjurus kepada terciptanya konflik dunia yang tiada berkesudahan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai badan dunia secara terus menerus merespon kondisi tersebut dengan mengemukakan suatu pemikiran dan usaha untuk menghindari konflik di masa depan dengan mengajarkan anak-anak yang ada di dunia melalui pendidikan formal tentang kebersamaan, harmoni, perilaku anti kekerasan dan menjadi pribadi sosial yang luhur. Salah satu cara yang dilakukan oleh PBB untuk mewujudkan tercapainya dunia yang damai melalui sektor pendidikan tersebut adalah dengan menggerakkan negara di dunia untuk berkomitmen menyelenggarakan dan mendukung pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi berarti mengakomodasi dan menempatkan anak pada sekolah reguler tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak berbakat (*gifted children*), anak di daerah terpencil, pekerja anak dan anak jalanan, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (UNESCO Tahun 2005).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, merespon dan mendukung komitmen dunia terhadap pendidikan inklusi dengan mengeluarkan beberapa perangkat undang undang, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang kesamaan hak pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan maupun kondisi geografis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Selain dari pada itu, Permendiknas no. 70 tahun 2009 pasal 4 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif (Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa). Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam mengenyam pendidikan.

Berdasarkan hal di atas, pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi terbuka di setiap jenjang dan satuan pendidikan. Sistem pendidikan inklusi memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersama sama belajar dengan anak-anak normal, sehingga adanya usaha atau proses penyesuaian diri anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan kehidupan sehari-hari secara lebih nyata.

Sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena sejak awal mereka diisolasi dari teman sebayanya. Tembok ini pun tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel, sehingga mengakibatkan interaksi sosial kelompok difabel di masyarakat menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel, sebaliknya kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi manajemen kurikulum inklusi di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Yogyakarta (SMPM 9) dan (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen kurikulum inklusi tersebut.

Kegunaan penelitian ini dalam skala praktis adalah memperoleh inspirasi, persepsi dan kreatifitas dalam menggali dan mengekspresikan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis melalui penulisan ilmiah, serta dapat memberikan dorongan motivasi untuk belajar lebih dalam maupun mendapatkan pengalaman yang intensif tentang sumber daya manusia. Selain dari pada itu, penelitian ini pun diusahakan akan memberikan masukan kepada dinas terkait, dalam penerapan

kurikulum inklusi. Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan menerapkan hal tersebut pada kasus nyata yang terjadi di lapangan dalam bidang pelaksanaan pendidikan inklusi secara khusus dan manajemen kurikulum secara umum.

Definisi kurikulum berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*Curriculae*” artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah (Hamalik, 2005: 16).

Pengertiannya dalam dunia pendidikan: suatu lingkaran pengajaran dimana guru dan murid terlibat di dalamnya. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2012: 3).

Kurikulum adalah program pendidikan (sekolah) bagi siswa berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Hamalik, 2010: 10).

Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran disuatu sekolah atau madrasah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah atau madrasah, itulah kurikulum. Apabila ditelusuri lebih jauh, kurikulum mempunyai berbagai macam arti, yaitu: 1) sebagai rencana pengajaran, 2) sebagai rencana belajar murid, 3) sebagai pengalaman belajar yang diperoleh murid dari sekolah atau madrasah (Hidayat, 2013: 21).

Menurut Hilda Taba, sebagaimana dikutip oleh Munir, bahwa kurikulum adalah perencanaan pembelajaran (*a curriculum is a plan for learning*). Rencana belajar biasanya berisi tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran dan evaluasi (Munir, 2008: 28). Menurut Ibrahim Bafadhal, bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman program belajar yang dipersiapkan dan diperuntukkan bagi peserta didik. Pada latar kanak – kanak, kurikulum disebut dengan istilah Program Kegiatan Belajar (PKB) (Bafadhal, 2006: 67).

Makna kurikulum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : tradisional, modern dan masa kini. Secara tradisional : kurikulum adalah mata pelajaran yang

diajarkan disekolah atau bidang studi. Modern : semua pengalaman aktual yang dimiliki siswa dibawah pengaruh sekolah. Masa kini : strategi yang digunakan untuk mengadaptasikan pewarisan kultural dalam mencapai tujuan sekolah (Sulistyono, 2009: 39).

Adapun Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum (Rusman, 2012: 3). Pendapat lain menerangkan, manajemen kurikulum adalah pengaturan yang dilakukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar (dalam istilah sekarang adalah pembelajaran), agar kegiatan tersebut dapat mencapai hasil maksimal (Mustari, 2014: 57). Manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan dititikberatkan pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar (Rusman, 2012: 3).

Menurut Rusman pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan relevansi dan realisasi antara kurikulum nasional (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. (Rusman, 2012:4).

Lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses pembelajaran di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Sejumlah ahli teori kurikulum berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan melainkan juga peristiwa – peristiwa yang terjadi dibawah pengawasan sekolah.

Menurut Rusman (2012:17) pemerintah pusat perlu merumuskan dan menetapkan kurikulum standar bersifat nasional (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang berfungsi sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut pihak daerah maupun sekolah bertugas mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan daerah maupun sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan atau desain kurikulum baik berupa silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkan secara spesifik, efektif, efisien, relevan, dan komprehensif.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kurikulum. Hamalik (2006:151) menyebut aspek – aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum yaitu berdasar konsep yang jelas, dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, bersifat reaktif, tujuan berkait minat anak, dan ada partisipasi kooperatif.

Kurikulum yang dikembangkan lembaga pendidikan sebaiknya berisi tentang bahan belajar, program pembelajaran, hasil pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas dan konsep yang mempunyai karakteristik tersendiri, serta memberikan bekal untuk kecakapan hidup (Rusman, 2012:59).

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk memudahkan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dan memudahkan siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara aktif.

Pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru di uji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang baik. Implementasi kurikulum merupakan bagian dari kegiatan inovasi, perubahan dan pengalaman belajar kepada siswa.

Menurut Zaenul (2013:41) implementasi kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: (1) karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna dilapangan, (2) strategi pengguna implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum dan kegiatan – kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum dilapangan dan (3) karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum harus mengacu pada standar proses pendidikan yang sudah dirancang oleh Badan Standar Nasional Pendidikan berupa konsep, prinsip, isi, metode dan sistem evaluasi pembelajaran.

Rusman (2013:94) menyatakan bahwa evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Di samping itu evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek.

Rusman (2013:99) menyatakan tujuan evaluasi adalah penyempurnaan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem evaluasi pembelajaran adalah suatu sistem atau cara penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan kecakapan siswa dalam menerima dan memahami pelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada penelitian dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode fenomenologi. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru mata pelajaran dan siswa ABK. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *interactive* model Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMPM 9 adalah sekolah yang berbasis inklusi sesuai dengan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2014 bahwa jumlah sekolah inklusi di Kota Yogyakarta ada 57 sekolah (Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 Tanggal 12 Juni 2014). Pada sekolah tersebut, terdapat kurang lebih sembilan peserta didik berkebutuhan khusus yang ikut proses pembelajaran di kelas reguler.

Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya (Ilahi, 2016: 171). Hal ini terjadi pula di SMPM 9, bahwa kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional yang berbeda pada tiap jenjangnya, seperti Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada manajemen kurikulum, berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan, begitu pula manajemen kurikulum inklusi.

Secara perencanaan, perencanaan kurikulum inklusi di sekolah tersebut mencakup beberapa hal, yaitu (a) Perencanaan kurikulum inklusi didasarkan pada salah satu ciri khas dari sekolah ini, yaitu sekolah inklusi berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2014. (b) Perencanaan dilakukan dengan membuat

struktur kurikulum mulai dari latar belakangnya, tujuan kurikulum, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang akan berkaitan langsung pada proses pembelajaran (c) adapun perencanaan kurikulum dilakukan oleh pihak sekolah sendiri dengan melibatkan tim manajemen sekolah, perwakilan guru, GPK serta turut diundang pula komite sekolah (d) kurikulum mengalami modifikasi dan dipilah menjadi 3 bagian. *Pertama*, anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi disiapkan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal. *Kedua*, anak dengan kemampuan akademik sedang (di bawah rata-rata), disiapkan kurikulum modifikasi fungsional/vokasional. *Ketiga*, anak dengan kemampuan akademik sangat rendah, disiapkan kurikulum pengembangan bina diri. Selain dari pada itu, perlu juga disiapkan kurikulum kompensatoris, yaitu kurikulum khusus untuk meminimalisir *barrier* pada setiap ABK sebelum belajar aspek akademik.

Secara organisasi kurikulum, paling tidak di sekolah tersebut melibatkan beberapa hal berikut, ruang lingkup, kontinuitas, keseimbangan bahan pelajaran dan alokasi waktu. Ruang lingkup materi yang disajikan, materinya diambil dari kehidupan bermasyarakat dan peserta didik seperti menghormati peserta didik lain yang memiliki kebutuhan khusus, tidak melakukan perbuatan tercela, memberikan apresiasi dan bergaul selayaknya dengan peserta didik normal lainnya.

Kontinuitas kurikulum memberikan gambaran bahwa pelajaran yang diberikan tidak mengalami pengulangan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Keseimbangan bahan pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, seperti keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi kurikulum dan keseimbangan yang berkaitan dengan proses atau cara belajar. Substansi dan isi kurikulum bagi tiap peserta didik relative sama, namun bagi peserta didik ABK, proses dan caranya sewaktu-waktu berbeda dengan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan gejala yang terjadi di dalam kelas ketika pembelajaran. Terkait unsur alokasi waktu, standar pembelajaran di dalam kelas dilakukan sama rata, namun ada pendamping khusus/psikolog serta tindakan yang dilakukan di ruang inklusi atau ruang sumber.

Memperhatikan fenomena yang terjadi di SMPM 9, kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus mengalami beberapa modifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Jika melihat tiga pembagian modifikasi di atas, maka di sekolah tersebut pun mengalami beberapa modifikasi sesuai dengan tingkatan, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Modifikasi Pertama, bagi peserta didik yang tergolong ABK, namun dengan kemampuan akademik rata-rata, maka kurikulum yang dipakai adalah

kurikulum terpadu dengan kurikulum normal. Hal ini diimplementasikan kepada peserta didik bernama Muhammad Rosyid Ridho kelas 7A dengan deskripsi Cerdas Istimewa (gangguan perilaku) dan Indrarasta Cakradigdaya kelas 9E dengan deskripsi Cerdas Istimewa (gangguan emosi). Selain dari pada itu, ada strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Guru kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK), yaitu dengan strategi *Positive Behavioral Support* (PBS).

Modifikasi Kedua, peserta di bawah kemampuan sedang, diberikan kurikulum modifikasi atau fungsional/vokasional. Hal ini telah dimodifikasi di SMPM 9 sebagai salah satu bahan acuan mengajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, ialah Rahmadian Noorqomaril kelas 8D dengan deskripsi Tuna Rungu. Bentuk modifikasi nya adalah Program Pembelajaran Individual (PPI) yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Pada implementasi jenjang kedua ini, ada beberapa komponen-komponen kurikulum yang harus dipenuhi, antara lain adanya komponen-komponen kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus. **Pertama, tujuan.** Pada pelaksanaan kurikulum, tujuan memegang peranan penting untuk mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen lainnya. Tujuan kurikulum dimaksudkan untuk perkembangan tuntutan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. **Kedua, materi atau bahan ajar.** Untuk mencapai suatu tujuan mengajar yang telah ditentukan, diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas topik-topik dan sub-sub topik tertentu yang mengandung ide pokok yang relevan dengan tujuan yang ditetapkan.

Bahan ajar yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensia normal, materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat diperluas dan diperdalam atau ditambah dengan materi baru yang tidak ada di dalam kurikulum reguler, tetapi materi tersebut dianggap penting untuk anak berbakat. Sementara bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensia relative normal, materi kurikulum sekolah reguler tetap dapat dipertahankan atau tingkat kesulitannya diturunkan sedikit. Demikian pula bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensia di bawah normal (anak lamban belajar/Tunagrahita) materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya sesuai dengan kebutuhan atau bahkan dihilangkan bagian tertentu.

Ketiga, Strategi pembelajaran. Penyusunan bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar. Ketika seorang guru menyusun bahan ajar, ia harus memikirkan strategi yang dapat digunakan. Ditinjau dari proses

pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, antara lain ialah *pertama*, Perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasarkan hasil asesmen dan dibuat bersama antara guru kelas dengan GPK dalam bentuk pembelajaran individual (PPI). *Kedua*, Pelaksanaan pembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, memberi kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaborasi antara guru kelas dengan GPK, serta dengan menggunakan media, sumber daya dan lingkungan yang beragam sesuai dengan kebutuhan (Ilahi, 2016: 173-174).

Fenomena yang terjadi di sekolah, interaksi antar guru kelas dan GPK selalu terjadi, paling tidak ketika ada tindakan di dalam kelas serta proses evaluasi pembelajaran. Pada suatu kondisi, peserta didik yang berkebutuhan khusus mengalami gejala atau kesulitan belajar di dalam kelas, maka pada saat itu tugas GPK sangat berperan, yaitu melakukan pendampingan belajar di kelas. Ketika pendampingan belajar di kelas menemui jalan buntu, maka strategi selanjutnya ialah melakukan tindakan di ruang sumber atau ruang inklusi yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Strategi pembelajaran selanjutnya ialah, peran psikolog yang disediakan oleh pihak sekolah, dapat juga mendampingi proses pembelajaran secara berkala di dalam kelas. Selain dari pada itu, strategi bersosialisasi antar individu ternyata menjadi salah satu cara yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan belajar.

Keempat, media pembelajaran. Penggunaan media sebagai perantara dalam proses pembelajaran memiliki nilai dan fungsi yang amat berharga bagi terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Media pembelajaran dapat melatih peserta didik untuk memperkuat kepekaan dan keterampilan secara optimal dengan ditopang oleh motivasi guru. Media pembelajaran merupakan komponen yang urgen, sebagaimana yang diutarakan oleh Nana Sujana., antara lain ialah *pertama*, penggunaan media pada dasarnya bukan sekedar sebagai fungsi tambahan, melainkan sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. *Kedua*, media pembelajaran berfungsi sebagai penjelas pesan, agar tidak teralusi verbalitas. *Ketiga*, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera. *Keempat*, penggunaan media belajar dapat menimbulkan gairah belajar, interaksi yang lebih antara peserta didik dengan sumber belajar. *Kelima*, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. *Keenam*, media pembelajaran memberikan nilai

rangsangan yang sama, mempersamakan bentuk pengalaman, dan menimbulkan suasana persepsi yang sama (Sujana, 1991: 23).

Media pembelajaran yang digunakan pada kegiatan pembelajaran di SMPM 9 termasuk dalam kategori lengkap. Buku tulis, buku tugas LKS, laptop menjadi salah satu media yang digunakan, baik siswa yang normal maupun berkebutuhan khusus. Selain dari pada itu, buku bergambar dijadikan sebagai salah satu media alternative ketika diharuskan melakukan tindakan lanjutan kepada para peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selain itu, media rancang bangun pun pernah dijadikan salah satu media untuk menjelaskan kepada para peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Modifikasi Ketiga, anak dengan kemampuan akademik rendah, disiapkan kurikulum pengembangan bina diri. Dalam implementasinya, kurikulum yang dipakai bagi peserta didik berikut ialah kurikulum nasional dan modifikasi kurikulum yang dipakai pada golongan kebutuhan khusus yang kedua, serta gaya interaksi yang lebih intensif dengan peserta didik ini. Adapun peserta didik yang termasuk golongan ini ialah Rozaan Mutawakkil Al Aqib kelas 7B deskripsi Autis Ringan, Muhammad Harun Musholihin kelas 7C deskripsi Tuna Grahita Ringan, Nurma Puji Astutik kelas 7E deskripsi *Slowleaner*, Nur Khusnul Khotimah kelas 8B deskripsi kesulitan belajar berhitung, Muhammad Aflah Panglima kelas 8C deskripsi Tuna Grahita Ringan, dan Muhammad Ramadhan Setiadijaya kelas 9A deskripsi *slowleaner*.

Pada proses pembelajaran golongan ketiga ini, peserta didik mengikuti proses pembelajaran seperti biasa bersama dengan murid-murid lain di jenjang kelas yang mereka tempati. Pada suatu kondisi, ketika kesulitan nampak pada peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka GPK sangat berperan dalam hal ini. GPK melakukan tindakan dengan membantu proses pembelajaran guru yang ada di kelas. Maka, tugas dan fungsi GPK salah satunya berjalan ketika ada perilaku kesulitan belajar siswa yang nampak, baik dari segi kemampuan akademik maupun dari segi sikap maupun emosi. Selain dari pada itu, program pendampingan belajar yang dilakukan oleh Psikolog pun diberlakukan oleh kepala sekolah, dalam rangka mengatur proses pembelajaran peserta didik yang berkebutuhan khusus. Para psikolog datang dan mendampingi para peserta didik yang berkebutuhan khusus secara berkala sebagaimana jadwal yang telah diatur oleh pihak sekolah, seperti hari Selasa, Kamis dan Jumat. Bilamana seluruh pendampingan pembelajaran yang dilakukan GPK dan psikolog di dalam kelas tidak membuahkan hasil, maka tindakan selanjutnya dilakukan di Ruang Inklusi sebagai tindakan lanjutan.

Tindakan lanjutan yang dilakukan di ruang inklusi, berupa tindakan bimbingan dan penyuluhan. Kegiatan bimbingan diarahkan pada kesulitan belajar akan suatu mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Langkah pertama yang dilakukan ialah GPK mengidentifikasi dalam hal apa kesulitan itu muncul. Kedua, GPK berusaha memberikan alternatif-alternatif jalan keluar untuk memecahkan permasalahan, tentu hal ini dilakukan secara perlahan dan bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan ketika proses pembelajaran selesai. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan ceramah ataupun arahan, memotivasi, membentuk semangat peserta didik untuk terus belajar, berinteraksi dengan lingkungan akademik maupun lingkungan pergaulan yang ada di sekolah. Implementasi kurikulum yang lainnya ialah adanya sosialisasi dan pembekalan yang dilakukan bagi semua guru di sekolah tentang sekolah Inklusi. Pembekalan pun dilakukan bagi seluruh siswa pada saat orientasi dan kegiatan ekstrakurikuler pelatihan bahasa isyarat yang dilakukan di sekolah.

Pengelolaan evaluasi kurikulum yang dilakukan menunjukkan bahwa:

- (a) Kegiatan evaluasi dilakukan setiap tahun ajaran baru dengan berpedoman pada sasaran mutu yang telah dibuat. Memperhatikan segi dimensi program yang didalamnya ada tujuan, isi kurikulum, dan pedoman kurikulum. Kemudian yang kedua dimensi pelaksanaan didalamnya ada input, proses, output dan dampak.
- (b) Melibatkan tim manajemen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah semua bidang, Kepala Urusan (KAUR) yang ada, dan bapak ibu guru atau GPK.
- (c) Prinsip yang digunakan ketika proses evaluasi diantaranya, prinsip keterpaduan yaitu kecocokan antara tujuan, materi pembelajaran, dan model pembelajaran. Selain itu pada proses evaluasi sekolah juga melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik, dan prinsip koherensi antara materi yang diajarkan dengan tingkat kemampuan peserta didik.
- (d) Tujuan dari kegiatan evaluasi kurikulum ini salah satu diantaranya adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan kurikulum dalam mendukung pengembangan.

Evaluasi berkala dalam penilaian kepada hasil belajar peserta didik ABK, dilakukan sesuai jadwal ujian dan soal-soal yang diberikan sama dengan peserta didik normal. Bilamana ada nilai peserta didik ABK yang berada di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), maka diberikan konversi nilai, penugasan khusus serta penilaian perilaku.

Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, terdapat berbagai macam faktor pendukung, antara lain ialah *pertama*, dukungan penuh dari kepala sekolah sebagai pengampu kebijakan. Dukungan kepala sekolah tersebut berbentuk pemberian kebebasan GPK untuk merencanakan, mengatur, memonitoring serta mengevaluasi peserta didik yang menjadi fokus tugasnya, yaitu peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Kedua, adanya pemahaman yang sama, antara tiap pribadi guru, baik itu guru kelas maupun guru inklusi tentang pelaksanaan program sekolah inklusi, sehingga adanya kesamaan dalam membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas.

Ketiga, pemahaman peserta didik yang cukup mapan terhadap anak berkebutuhan khusus. Interaksi dan sikap saling tolong menolong nampak kental terlihat di sekolah. Peserta didik yang normal tidak segan segan untuk bersosialisasi dengan peserta didik ABK. Pembentukan sikap seperti ini mulai ditanamkan oleh pihak sekolah semenjak masa-masa awal atau orientasi sekolah. Hal ini termasuk dalam kegiatan Sosialisasi Program Sekolah Inklusi, di mana penjelasan dan pengarahan tentang sekolah inklusi ditanamkan sejak dini, sehingga sikap ataupun perilaku positif mulai tumbuh berkembang selama proses pembelajaran.

Keempat, kebijakan pendampingan psikolog dalam program pendidikan Inklusi. Langkah ini menjadi sangat tepat, karena ada psikolog yang ikut membantu proses pendampingan belajar bagi peserta didik ABK. Selain dari pada itu, pemantauan dan identifikasi tentang peserta didik ABK dapat lebih mendalam, karena para psikolog yang hadir mendampingi sekaligus menjadi mitra diskusi GPK dalam penyelesaian masalah.

Kelima, tercukupinya perangkat pendukung tindakan inklusi. Dalam perkembangan sekolah inklusi, perangkat pendukung proses pembelajaran mengalami pelengkapan, seperti ruang inklusi (tindakan inklusi), kurikulum inklusi sebagai modifikasi terhadap kurikulum nasional, dan bahan ajar.

Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, terdapat pula faktor penghambat, antara lain ialah (Wawancara dengan GPK pada tanggal 21 November 2017 pukul 07.45 WIB) *pertama*, proses perencanaan dan pembuatan program pembelajaran hanya dilakukan oleh GPK, tanpa ada campur tangan guru mata pelajaran. Padahal idealnya, perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasarkan hasil asesmen dan dibuat bersama antara guru kelas atau guru mata pelajaran dengan GPK dalam bentuk pembelajaran individual (PPI) (Ilahi, 2016: 173-

174). *Kedua*, kondisi peserta didik yang terkadang tidak dapat ditebak, sehingga ketika semua membutuhkan tindakan khusus, tidak bisa secara langsung dapat ditangani seluruhnya. Ketika terjadi hal-hal seperti ini, maka tindakan yang dilakukan melihat tingkat kebutuhan peserta didik ABK, kemudian melakukan tindakan satu per satu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Inklusi mencakup pada empat aspek, yaitu perencanaan, implementasi, organisasi dan evaluasi kurikulum. Adapun Implementasi Manajemen Kurikulum Inklusi di sekolah ini terdiri dari (a) secara proses perencanaan, kurikulum inklusi yang ada di SMPM 9 ini berupa kurikulum nasional yang bersifat umum dan modifikasi kurikulum yang bersifat khusus (b) secara organisasi kurikulum, di sekolah tersebut melibatkan beberapa hal berikut, ruang lingkup, kontinuitas, keseimbangan bahan pelajaran dan alokasi waktu (c) implementasi kurikulum, klasifikasi kemampuan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap kemampuan peserta didik ABK serta strategi *Positive Behavioral Support* dan pendampingan psikolog bagi peserta didik ABK (d) evaluasi kurikulum telah berjalan secara terstruktur dan menyeluruh. Adapun Faktor pendukung dan penghambat adalah (a) faktor pendukung yang ditemukan ialah dukungan penuh kepala sekolah, pemahaman yang cukup mapan di antara guru dan peserta didik tentang peserta didik ABK, kebijakan pendampingan yang dilakukan pula oleh psikolog serta tercukupinya perangkat tindakan inklusi (b) faktor penghambat yang ditemukan ialah proses pembuatan perencanaan dan program pembelajaran individu hanya dilakukan oleh guru GPK. Faktor selanjutnya ialah tidak dapat ditebaknya kondisi para peserta didik ABK, sehingga pada suatu waktu, semua peserta didik ABK membutuhkan tindakan yang sama, sehingga penanganan menjadi kewalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Riska., “Memaknai dan Mengembangkan Keberagaman Peserta Didik Melalui Pendidikan Inklusif”. *PEDAGOGI Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Volume X No. 2 November 2010.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penilitin Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Arifin, Muhammad. 2003. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Bumi Aksara.
- Arifin, Muzayyin. 2003. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Bumi Aksara.
- Bafadhal, Ibrahim. 2006. *Dasar – Dasar Manajemen & Supervisi Taman Kanak – Kanak*, Jakarta: Bumi Akasara.

- Best, John W. 1982. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Alih Bahasa Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Creswell, John. 2015. *Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif (Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative)*. Alih Bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Data Akademik SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta.
- Data Deskripsi Siswa Berkebutuhan Khusus SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta Tahun Akademik 2017/2018.
- Data Siswa ABK SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusif*, Jakarta. 2007
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004. *Mengenal Pendidikan Terpadu*, Buku I. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.
- Fitria, Ayu. “*Model Pendidikan Inklusi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Sewon Bantul*”, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Hamalik. Oemar. 2010. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamalik. Oemar. 2005. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Haryono (*et.al.*), “Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol. 32 Nomor 2 Tahun 2015.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hermanto, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif *Jurnal Pendidikan Khusus* Vol. 6 No. I Mei 2010.
- Hidayat. Sholeh. 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hikmat. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Ilahi, Muhammad Takdir. 2016. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Johandri, “*Manajemen Pembelajaran Siswa Tunanetra (Studi Kasus di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta)*”, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Karwanto, Subiantoro dan,. Manajemen Kurikulum Berbasis *Entrepreneurship* di SMA Muhammadiyah 9 Surabaya. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* Volume 1 No.1 2016.
- Khilmiyah, Akif. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Lestari, Fitria Dewi Puji. Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama *Jurnal Pendidikan Khusus Universitas Negeri Surabaya* 2017.
- Ma’ruf, Amir. *Model Pendidikan Inklusif di MAN Maguwoharjo*. Skripsi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.
- Margono, 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marianne (*et.al*). 2000. *Leadership and Strategic Management in Education*. Leicester-Inggris: EMDU (*Educational Management Development Unit*)-University of Leicester.
- Moleong, Lexy J., 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Munir, 2008. *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung: Alfabeta.
- Mustari, Mohamad. 2014. *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhidayat, *Manajemen Pendidikan Inklusif: Tinjauan Khusus Pada Sistem Penerimaan Siswa Baru, Manajemen Pengajaran Kelas Inklusif, dan Model Pendidikan Studi Kasus Di SD Negeri Percobaan 1 Kota Malang*. Skripsi Universitas Malang. 2008.
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi, *Manajemen Pendidikan Inklusi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa Depdiknas, 2003.
- Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Profil SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta Tahun 2017.
- Rusman. 2012. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta. Rajawali Pers.

- Salim, Abdul. Pengembangan Model Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusif Berbasis Kebutuhan Individu Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Volume 16 No. 7 2010.
- Setiawan, Ady. Pelaksanaan Kurikulum Modifikasi di Sekolah Inklusif (Studi Kasus di SD Negeri 4 Krebet Jambon Ponorogo, *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* Volume 1 No. 1 2016.
- Smith, David J. 2015. *Sekolah Untuk Semua, Teori dan Implementasi Inklusi*. Editor Ahli Muhamad Sugiarmun dan Mif Baihaqi. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Suharno. 2008. *Manajemen Pendidikan (Sebuah Pengantar Bagi Para Calon Guru)*. LPP UNS dan UNS Press.
- Suharsimi. Arikunto. 2008. *Evaluasi program pendidikan: pedoman teoretis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujana, Nana. 1991. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Sukardi, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistyorini, 2009. *Manajemen Pendidikan Islam*, Surabaya : TERAS.
- Sunaryo, Sunardi dan. Manajemen Pendidikan Inklusif *Jurnal penelitian AHL_Anakku* Volume 10: Nomor 2 Tahun 2011
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 Tanggal 12 Juni 2014.
- Syaodih, Nana. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Syaodih, Nana. 2015. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UNESCO. *Guidelines for Inclusion : Ensuring access to Education for All*. 2005.
- Wantah, Maria J., Evaluasi Program Pendidikan Inklusif di SD Negeri Gejayan Kabupaten Sleman Yogyakarta., *Jurnal Cakrawala Pendidikan (Jurnal Ilmiah Pendidikan)*, No. 1, Th. XXVII, Februari 2008
- Wati. Ery., “Manajemen Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* Volume XIV No. 2 Bulan Februari 2014.

Wiryokusumo, Iskandar dan Usman Mulyadi. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara.

www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF . *The Salamanca Statement And Framework For Action On Special Needs Education*. Adopted By The World Conference On Special Needs Education: Access And Quality Salamanca, Spain, 7-10 June 1994. Butir 2.